



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HJ. NURHUDAYAH
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 452182

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.370.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 278 m2/200 m2 di GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 389 m2 di GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. Tanah Seluas 425 m2 di GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/240 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 253.000.000

1. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, TOYOTA/RUSH MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 70.000.000

D. SURAT BERTAGIH

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 472.672.665

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 2.165.672.665

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.165.672.665

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.